

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ade Kosasih. John Kenedi, dan Imam Mahdi, 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Panda.
- Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Anwar, et.al. 2021. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Fajlurrahman Jurdi. Editor, Muhammad Fauzan Zarkasi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hendra Nurtjahjo. Yustus Maturbongs. dan Diani Indah Rachmitasar. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Graha Mandiri.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian. Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Irwansyah. Editor, Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Cat. 3, Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- M. Irfan Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubarok dan Nanang Suparman. 2019. *Pelayanan Publik Kontemporer*. Bandung: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Majapahit: Mataram University Press.
- Nandang Alamsah. Soni Akhmad Nulhaqim, et.al, 2004. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Pres.

- Prajudi Atmosudirji. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman Mulyawan. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jawa Barat: Unpad Press.
- Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahya Anggara. 2018. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. 1999. *Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Primamedia Pustaka.
- Sri Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Ulber Silalahi dan Wirman Syafri. 2015. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*. Sumedang: IPDN Press.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

## **Jurnal**

- Aan Eko Widiarto. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol.16, Nomor 1.
- Azmiati Zuliah dan Asri Pulungan. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*. Vol. 1, Nomor 1.
- Galang Asmara. (2016). Karakteristik Lembaga Ombudsman di Indonesia Dibandingkan dengan Lembaga Ombudsman Swedia, Inggris, Prancis, dan Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, Nomor 1.
- Helmi .M. (2016). Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV. Nomor 2.
- Hendra Nurtjahjo. (2016). Perbedaan Teoritis Antara Lembaga Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) Dengan Lembaga Peradilan Administrasi (PTUN). *Jurnal Selisik*. Vol. 2, Nomor 4.
- Idul Rishan. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18, Nomor 1.

- Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda. (2021). Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 4, Nomor 1.
- Muhammad Rus'an Yasin. (2016). Telaah tentang Rekomendasi Ombudsman terhadap Fraud Perbankan. *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 4, Nomor 11.
- Novianti. (2021). Dampak Hukum Alih Status Kepegawaian KPK. *Jurnal Parliamentary Review*. Vol. III, Nomor. 3.
- Renius Albert Marfin, dan Anna Erliyana. (2019). Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 49, Nomor 4.
- Roberto Beca Marino. (2020). Alcances de la presunción de licitud en el procedimiento administrativo sancionador (Scope of the presumption of legality in the administrative sanctioning procedure). *Revista Derecho & Sociedad*. N° 54 (I).
- Robinsar Marbun. (2017). Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Yuridis*. Vol. 4. Nomor. 2.

## **Modul**

- Achmad Batinggi dan Badu Ahmad. Modul 1. *Pengertian Pelayanan Umum dan Sistem Manajemen*.
- Isrofin dan Binti. 2019. *Modul 1 Asesmen Kebutuhan Peserta Didik dan Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Digital Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 2014. *Tes Wawasan kebangsaan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI), Bahasa Indonesia*.

## **Skripsi**

- Ali Irfan Effendi Rangkuti. 2021. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dirwansyah. 2021. *Analisis Hukum Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bank Indonesia Dalam Pencegahan Risiko Sistemik Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Triyono. 2019. *Pengawasan Dan Implikasi Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Studi Kasus Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## **Tesis**

Ezriani Mardiana Idris Harahap. 2012. *Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035).

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13/RILIS/BKN/V/2021 Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN

Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia No. 030/HM.01/VII/2021.

## **Kamus**

Qonita Alya. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. PT. Indah Jaya Adipratama (Anggota IKAPI). Bandung.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth (9<sup>th</sup>) Edition, West Publishing Co, United States of America.

## **Interview**

Muhammad Irwan (Wakil Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar). Ombudsman Kota Makassar. Februari 2022.

Muslimin B. Putra (Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan). Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Maret 2022.

## **Internet**

Agus Rahmat dan Edwin Firdaus. Artikel: *Ombudsman RI Kirim Rekomendasi TWK KPK ke Jokowi dan DPR*. Internet: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1405242-ombudsman-ri-kirim-rekomendasi-twk-kpk-ke-jokowi-dan-dpr>. September 2021. Diakses tanggal 19 Maret 2022.

Andita Rahma. Artikel: *Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai yang Tolak Hasil TWK*. Internet: <https://nasional.tempo.co/read/1468437/pimpinan-kpk-tolak-surat-keberatan-pegawai-yang-tolak-hasil-twk>. Juni 2021. Diakses tanggal 13 Januari 2021.

Nurul Ghufron. *Tolak Rekomendasi Ombudsman, Wakil Ketua KPK: Keberatan KPK Bukan Pembangkangan, tapi Hak*. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=J1cGq7IKXbQ>. Agustus 2021. Diakses tanggal 9 September 2021.

Ombudsman RI. Konferensi Pers: *Ombudsman RI Sampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Aduan Pegawai KPK*. Youtube: [http://youtu.be/wWy-W\\_EWXzQ](http://youtu.be/wWy-W_EWXzQ). Juli 2021. Diakses tanggal 9 September 2021.